RISALAH

RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 16 AGUSTUS 2019

TENTANG

MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PERINGATAN HUT
KE- 74 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 DAN
PENGANTAR/ KETERANGAN ATAS RUU APBN TAHUN 2020
BESERTA NOTA KEUANGAN DAN DOKUMEN PENDUKUNGNYA

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194
Rembang 59212

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN DALAM RANGKA PERINGATAN HUT KE- 74 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 DAN PENGANTAR / KETERANGAN ATAS RAPBN TAHUN 2020 BESERTA NOTA KEUANGANNYA

Hari : Jum'at
Tanggal : 16 Agustus 2018
Waktu : 09.30 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang

II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka

III. **ACARA RAPAT**:

1. Pembukaan;
2. Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka Peringatan HUT ke- 74 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2019;
3. Skors;
4. Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka Penyampaian Pengantar/ Keterangan Pemerintah atas RAPBN Tahun 2020 beserta Nota Keuangannya;
5. Penutup.

IV. **PIMPINAN RAPAT**

1. Nama : **H. GUNASIH, S.E.**
2. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. **SEKRETARIS RAPAT**

1. Nama : **Drs. DRUPODO, M.Si.**
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. **JUMLAH ANGGOTA**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraski Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	: 45 orang

VII. **ANGGOTA YANG HADIR**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 3 orang
2. Fraksi Demokrat	: 4 orang
3. Fraski Kebangkitan Bangsa	: 2 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 6 orang
5. Fraksi Gerindra	: 1 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 1 orang
7. Fraksi Harapan	: 2 orang
Jumlah	: 19 orang

VIII. **ANGGOTA YANG TIDAK HADIR**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 7 orang
2. Fraksi Demokrat	: 4 orang

3. Fraski Kebangkitan Bangsa	: 4 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 2 orang
5. Fraksi Gerindra	: 4 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 3 orang
7. Fraksi Harapan	: 2 orang
Jumlah	: 26 orang

IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. GUNASIH, S.E.

LAGU INDONESIA RAYA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang kami hormati

- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda beserta Kepala Bagian dilingkungan Setda Kabupaten Rembang;
- Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Rembang;
- Camat Se Kabupaten Rembang;
- Serta para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali rapat paripurna, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa , atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini Jum'at tanggal 16 Agustus 2019 kita berkesempatan mengikuti Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT Ke-74

Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2019 dan Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 beserta Nota Keuangan dan Dukumen Pendukungnya. Rapat paripurna ini dilaksanakan atas dasar rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang pada tanggal 12 Agustus 2019, serta berpedoman pada Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor : B-780 / M.Sesneg / Set / TU.00.04 / 07 / 2019 tanggal 23 Juli 2019 perihal Pedoman Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2019.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Pada tanggal 17 Agustus 2019 esok pagi, bangsa Indonesia memperingati Hari Ulang Tahun kemerdekaan yang ke-74. Hari yang bersejarah dan tidak pernah dilupakan, selalu dikenang, selalu diperingati, karena mulai tanggal, bulan dan tahun tersebut Indonesia lahir, Indonesia bebas dari cengkeraman penjajah yang menindas, menjajah dan merampas hak azasi bangsa Indonesia waktu itu. Kemerdekaan Indonesia bukanlah semata-mata pemberian dari bangsa lain, namun kemerdekaan Indonesia adalah anugerah dari Allah SWT disertai perjuangan para pejuang bangsa yang mati-matian, tak kenal lelah, tak putus asa dan pantang mundur dalam mengusir penjajah. Oleh sebab itu, sebagai anak bangsa, kita hendaknya memahami liku-liku perjuangan para pejuang bangsa, serta selalu menghargai jasa-jasa para pejuang yang gugur di medan perang demi Indonesia tercinta ini. Pada saat ini yang sangat penting adalah meneladani dan meneruskan perjuangan mereka dengan cara mengisi kemerdekaan melalui pembangunan disegala bidang, dan meneruskan kometmen untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.

Melalui tema yang dicanangkan dalam peringatan HUT Kemerdekaan Ke-74 Republik Indonesia Tahun 2019 yaitu " SDM Unggul Indonesia Maju ", marilah kita tingkatkan semangat belajar kita, semangat kerja kita, semangat kebersamaan kita untuk mewujudkan Rembang yang kita cintai ini, menjadi Kabupaten Rembang yang semakin mandiri, aman, damai, amanah nyaman dan beriman. Amiin.

Pada kesempatan yang berbahagia ini pula, kami mengucapkan selamat Hari Pramuka ke – 58, semoga Pramuka di Kabupaten Rembang selalu jaya dan melahirkan tunas-tunas muda yang bisa membawa Kabupaten Rembang yang lebih baik.

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa dari sejumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 19 orang

Sehubungan Rapat Paripurna ini tidak mengambil keputusan, dan dalam pelaksanaannya tanpa memperhitungkan jumlah anggota Dewan yang hadir, maka dengan mengucap " ***Bismillahirrohmanirrohim***" tepat pukul 10. 10 WIB Rapat Paripurna hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Sebelum memasuki acara pokok, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara pada Rapat Paripurna hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2019;

3. Skorsing;
4. Mendengarkan Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2020 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya;
5. Penutup.

Marilah kita masuki acara kedua, yang merupakan agenda pokok pertama dalam rapat paripurna ini, yaitu ***"Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2019".***

Untuk itu, rapat paripurna saya skors.

(Ketuk palu 1 kali)

Kepada Saudara Bupati, Wakil Bupati, anggota Forkopimda serta rekan-rekan Pimpinan DPRD dipersilahkan menempatkan diri di tempat duduk yang telah disediakan.

=====MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI DALAM RANGKA HUT KEMERDEKAAN RI KE-74 TAHUN 2019

=====

- ***(Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2019 terlampir)***

Skorsing saya cabut, Rapat Paripurna kita lanjutkan kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Demikian tadi, telah kita ikuti Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2019. Acara selanjutnya yaitu Mendengarkan Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2020 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya. Sehubungan dalam penyampaiannya dilaksanakan pada pukul 14.00 WIB, maka rapat paripurna kami skors sampai pukul 13. 30 WIB.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Waktu skors saya cabut, rapat paripurna saya lanjutkan kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Selanjutnya marilah kita ikuti acara pokok yang kedua yaitu ***" Mendengarkan Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2020 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya"***.

Untuk keperluan tersebut, maka rapat paripurna saya skors.

(Ketuk palu 1 kali)

Kepada Saudara Bupati, Wakil Bupati, Anggota Forkopimda dan rekan-rekan Pimpinan DPRD dipersilahkan menempatkan diri di tempat duduk yang telah disediakan.

=======PENYAMPAIAN PENGANTAR/ KETERANGAN PEMERINTAH ATAS RUU TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2020 BESERTA NOTA KEUANGAN DAN DOKUMEN PENDUKUNGNYA========

- ***(Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2020 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya terlampir)***

Skorsing saya cabut, Rapat Paripurna kita lanjutkan kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Baru saja kita dengarkan Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2020 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya. Dengan telah disampaikannya Pengantar Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2020, maka selesai sudah acara rapat paripurna ini.

Sebelum saya akhiri, untuk mengenang, menumbuhkan kebanggaan dan semangat kecintaan kita kepada para pendahulu kita, marilah kita kumandangkan pekik kemerdekaan : **.."MERDEKA" !!** *(berteriak sambil mengepalkan tangan).*

Akhirnya dengan mengucap "***Alhamdulillahirobbil'alamin***" tepat pukul 15.20 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Terimakasih atas perhatian dan kehadirannya.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

WAKIL KETUA,	SEKRETARIS,
H. GUNASIH, S.E.	**Drs. DRUPODO, M.Si.**
	Pembina Utama Muda
	NIP. 19670421 199303 1 009

LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN DALAM RANGKA PERINGATAN HUT KE- 74 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 DAN PENGANTAR / KETERANGAN ATAS RAPBN TAHUN 2020 BESERTA NOTA KEUANGANNYA

LAMPIRAN I	:	Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan Camat Se Kabupaten Rembang;
LAMPIRAN II	:	Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka Peringatan HUT ke - 74 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2019;
LAMPIRAN III	:	Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka Penyampain/ Keterangan atas RAPBN Tahun 2020 beserta Nota Keuangannya.

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PERINGATAN HUT KE- 74 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019

HARI/TANGGAL : JUM'AT, 16 AGUSTUS 2019
PUKUL : 09.30 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota		
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd.	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10	
	FRAKSI DEMOKRAT			
11	H. GUNASIH, S.E.	Wakil Ketua DPRD	11	
12	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H.	Anggota	12	
13	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	13	
14	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	14	
15	H. ISLAHUDDIN	Anggota	15	
16	H. HARNO, S.E.	Anggota	16	
17	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	17	
18	MOHAMMAD HARIYADI	Anggota	18	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19	
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20	
21	ILYAS	Anggota	21	
22	SHOLEH, B.A	Anggota	22	
23	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi.	Anggota	23	
24	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	24	

	FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25	
26	JASMANI	Anggota	26	
27	WIDODO	Anggota	27	
28	ALI IRCHAM, S.T.	Anggota	28	
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29	
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	30	
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31	
32	SUSTIYONO	Anggota	32	
	FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIAWAN, S.E.	Anggota	33	
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34	
35	PUJI SANTOSO, SP, M.H.	Anggota	35	
36	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	36	
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37	
	FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI, S.H.	Anggota	38	
39	GATOT PAERAN, S.H, M.Si.	Anggota	39	
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	40	
41	ALI IMRON WAHYUDI	Anggota	41	
	FRAKSI HARAPAN			
42	SUKARMAIN	Anggota	42	
43	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	43	
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd.	Anggota	44	
45	NUR JANNAH	Anggota	45	

Keterangan :

1 I : Ijin
2 S : Sakit
3 C : Cuti
4 DL : Dinas Luar

DPRD KABUPATEN REMBANG
PIMPINAN RAPAT,

.....

DAFTAR HADIR FORKOMPINDA

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PERINGATAN HUT KE- 74 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 DAN PENGANTAR/ KETERANGAN ATAS RUU APBN TAHUN 2020
BESERTA NOTA KEUANGANNYA

HARI/TANGGAL : JUM'AT, 16 AGUSTUS 2019
PUKUL : 09.30 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.	Bupati Rembang	1. .....
2	BAYU ANDRIYANTO,S.E.	Wakil Bupati Rembang	2. .....
3	BINTARNO, SH MH	Kejaksaan Negeri Rembang	3. .....
4	SUHARNO, SH.	Pengadilan Negeri Rembang	4. .....
5	Anak Bagus Setyawan	Dandim 0720 Rembang	5. .....
6	SUHARNO, SH.	Kepolisian Resort Rembang	6. .....
7	.....	Pengadilan Agama Kab. Rembang	7. .....
8	Drs. SUBAKTI	Sekertaris Daerah	8. .....

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Drs. DRUPODO, M.Si
NIP. 19670421 199303 1 009

DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PERINGATAN HUT KE- 74 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 DAN PENGANTAR/ KETERANGAN ATAS RUU APBN TAHUN 2020 BESERTA NOTA KEUANGANNYA

HARI/TANGGAL : JUM'AT, 16 AGUSTUS 2019
PUKUL : 09.30 WIB

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	MUSTHOLIH	1
2	CAMAT KALIORI	.....	2
3	CAMAT SUMBER	Drs. Cahyono	3
4	CAMAT SULANG	Slamet H	4
5	CAMAT BULU	SLAMET RIYADI	5
6	CAMAT PAMOTAN	Nor Fida	6
7	CAMAT GUNEM	Ach. Sholeh	7
8	CAMAT SALE	.....	8
9	CAMAT LASEM	Lasi/no ali	9
10	CAMAT PANCUR	Suhud	10
11	CAMAT SEDAN	.....	11
12	CAMAT SLUKE	Hartono	12
13	CAMAT KRAGAN	PRAPTO R	13
14	CAMAT SARANG	MUNTAQIN	14

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Drs. DRUPODO, M.Si
NIP. 19670421 199303 1 009

DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PERINGATAN HUT KE- 74 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 DAN PENGANTAR/ KETERANGAN ATAS RUU APBN TAHUN 2020 BESERTA NOTA KEUANGANNYA

HARI/TANGGAL : JUM'AT, 16 AGUSTUS 2019
PUKUL : 09.30 WIB

NO	JABATAN	N A M A	TANDA TANGAN
1	Kapolsek Rembang	.....	1.....
2	Kapolsek Kaliori	.....	2.....
3	Kapolsek Sumber	.....	3.....
4	Kapolsek Sulang	.....	4.....
5	Kapolsek Bulu	.....	5.....
6	Kapolsek Pamotan	.....	6.....
7	Kapolsek Gunem	.....	7.....
8	Kapolsek Sale	.....	8.....
9	Kapolsek Lasem	.....	9.....
10	Kapolsek Pancur	.....	10.....
11	Kapolsek Sedan	.....	11.....
12	Kapolsek Sluke	.....	12.....
13	Kapolsek Kragan	.....	13.....
14	Kapolsek Sarang	.....	14.....

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Drs. DRUPODO, M.Si
NIP. 19670421 199303 1 009

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PERINGATAN HUT KE- 74 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 DAN PENGANTAR/ KETERANGAN ATAS RUU APBN TAHUN 2020 BESERTA NOTA KEUANGANNYA

HARI/TANGGAL : JUM'AT, 16 AGUSTUS 2019
PUKUL : 09.30 WIB

NO	JABATAN	N A M A	TANDA TANGAN
1	Danramil Rembang	.....	1.....
2	Danramil Kaliori	.....	2.....
3	Danramil Sumber	.....	3.....
4	Danramil Sulang	.....	4.....
5	Danramil Bulu	.....	5.....
6	Danramil Pamotan	.....	6.....
7	Danramil Gunem	.....	7.....
8	Danramil Sale	.....	8.....
9	Danramil Lasem	.....	9.....
10	Danramil Pancur	.....	10.....
11	Danramil Sedan	.....	11.....
12	Danramil Sluke	.....	12.....
13	Danramil Kragan	.....	13.....
14	Danramil Sarang	.....	14.....

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Drs. DRUPODO, M.Si
NIP. 19670421 199303 1 009

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PERINGATAN HUT KE- 74 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 DAN PENGANTAR/ KETERANGAN ATAS RUU APBN TAHUN 2020
BESERTA NOTA KEUANGANNYA

HARI/TANGGAL : JUM'AT, 16 AGUSTUS 2019
PUKUL : 09.30 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI			1
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI	Taris		4
5	ASISTEN I SEKDA	A. MOKLIF		5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA			7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	NURPURNOMO	Bag Tapem	8
9	BAG. HUKUM	TRI Mayanto	Bag Hum	9
10	BAG. HUMAS	NURPURNOMO	Humas	10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Agus Isz H	Kabag	11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT			13
14	BAG. ORGANISASI & KEPEGAWAIAN	AFAN	Kabag	14
15	BAG. UMUM	Gantiarti		15
16	BPPKAD	MUKTAR	KABAN	16
17	INSPEKTORAT	FAHRUDIN	INSPEKTUR	17
18	BAPPEDA	Bpi Wahyuni	Kep	18
19	DINSOSP2KB	Sri Lestariningsih	Kep	19
20	B K D	Supartmin		20
21	B P B D	A Budi Arwoko	PLT Kalak	21
22	DPU TATA RUANG	SUGIHARTO	DPU	22
23	DPKP/ DINPERKIM	Joestiennarto	Kadin	23
24	DINAS KESEHATAN	Ali Syafri	Kadis	24
25	DINDIKPORA	Budi Rocho	Sekdis	25
26	DINPERINDAGKOP & UMKM	Alexander		26
27	DINTANPAN	Suraamin		27
28	DINLUTKAN	Suparnoan	Kadis	28
29	DINKOMINFO	Hartono	Kadin	29
30	DINAS PERHUBUNGAN	Moh. Daeruri	Kadis plt	30
31	DINAS DUKCAPIL	Moh. Daeruri	Kadis	31

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
32	DINPERMADES			32
33	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Drs. Purwanto		33
34	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Maryoko	Sekretaris	34
35	KANTOR KESBANGPOLINMAS	KARTONO	Ka	35
36	DINAS ARSIP & PERPUSTAKAAN	Hj. Apus Sudin	Dinas	36
37	DINAS PMPTSP NAKER	EGUNG	Kasi	37
38	RSUD dr. R. SUTRASNO	Agus Setyadi	RSUD	38
39	SATPOL PP	H. WAHLIYO	Kasat	39
40	TIM PKK KAB. REMBANG			40
41	P D A M			41
42	PERCETAKAN DAERAH			42
43	PD. BANK PASAR			43
44	PT. MIGAS REMBANG ENERGY			44
45	BANK BNI 46			45
46	BANK JATENG CAB. REMBANG			46
47	BRI CAB. REMBANG			47
48	PD BPR BKK LASEM			48
49	PT. R B S J			49
50	APOTIK DAERAH			50
51	KANTOR KEMENTRIAN AGAMA	ALI muchyidin	Kasi	51
52	DIPENDA PROPINSI			52
53	BPS KAB. REMBANG	HENRI W.	Ka.	53
54	RUMAH TAHANAN			54
55	PERHUTANI KPH MANTINGAN			55
56	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			56
57	KANTOR PERHUTANI SPH IV			57
58	KANTOR POS DAN GIRO			58
59	TELKOM REMBANG			59
60	PLN CAB. REMBANG			60
61	BAWASLU KAB. REMBANG			61
62	B P N KAB. REMBANG	SUSILO DWI P	Kasi HHP	62
63	KANTOR PAJAK			63
64	UP3AD (ASET DAERAH)			64
65	KANTOR PELABUHAN			65
66	KETUA KPU KAB. REMBANG			66
67	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			67
68	PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			68

1	2	3	4	5
70	[illegible] NAKER	DEDEH N	KABID	70
71	[illegible]	[illegible]	Sek	71
72	[illegible] NAKER	MUKAI	Kabid	72
73	[illegible]	[illegible]	[illegible]	73
74	DISNAKERPAN	DEREK NETI N	SEKDIN	74
75	— " —	Sri Prabandari	Kabid	75
76	DINSOSPPKB	Budi Setiawan	Kabid	76
77	BPPKB	[illegible]	Kabid	77
78	[illegible]	[illegible]	[illegible]	78
79	DINTANDAN	DESTI MURYADI	KABID	79
80	BPPKB	Sukarminingsih	Sek	80
81	Bappeda	Sri Suryaningsih	Sekretaris	81
82	Bappeda	[illegible]	Kabid	82
83	Bappeda	Nurrohmah	Kabid	83
84	Bappeda	[illegible]	[illegible]	84
85	BKD.	MARSONO	KABID	85
86	BKD	Bambang R	Kabid	86
87	Dinarpus	Winaryu K	Sekdin	87
88	Dinarpus	Y. Dwi [illegible]	Kabid	88
89	PRIYADI DINSOSPPKB	PRIYADI.	KABID KB	89
90	DINSOSPPKB	NGATINI	SEKRET	90
91	NASATON PUTRA	DINSOS	KABID	91
92	BKD.	ARIF R.		92
93	Dinarpus	AB Bagus I	Kabid	93
94	TONI MARTANTO	BKD	Kabid	94
95	Supriyanto	Kodim 0726		95
96	Sutarjiko	RSUD		96
97	[illegible]	DISPERINDAG	Kabid	97
98	[illegible]	[illegible]		98
99	[illegible]	INSPEKTORAT		99
100	Arif Rahman	BKD	Perawat	100
101	[illegible]	Anis		101
102	Satpol PP	Tegar M	Kabid	102
103	Wijayanti	Bappeda	Kabid	103
104	Chris Prasetyana	Dinbudpar	Kabid	104
105	[illegible]	Dinbudpar	Kabid	105
106	SETWAN	SRI WATINI	KABAG ADM	106
107				107
108				108

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
109	Sekretariat Dinporabudpar	Sekretaris	Kasubag	109
110	Agus Iwan H	Setda	Kasubag	110
111	Wartono	Kabid	Kabid	111
112	Puji Purwati.	Dinporabudpar	Kabid	112
113				113
114				114
115				115
116				116
117				117
118				118
119				119
120				120
121				121
122				122
123				123
124				124
125				125
126				126
127				127
128				128
129				129
130				130
131				131
132				132
133				133
134				134
135				135
136				136
137				137
138				138
139				139
140				140
141				141
142				142
143				143
144				144
145				145
146				

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
148	TELKOM	ISMARTO	Officer	148
149	Kodim 0720	[illegible]	[illegible]	149
150	Kodim 0720	TARMAJI	TEN	150
151	Kodim 0720	MASRUKIN	LOG	151
152	Kodim 0720	YOYOK	Kasubsi	152
153	Kodim 0720	Dwi	Anggota	153
154	Kantor Polres	Nandar	Anggota	154
155	Polres	Sufyan	-	155
156		Agus W		156
157	SRIWATAN	SRI WATINI	KABAG ADP	157
158	FAHRUDIN	FAHRIJAN	INSPEKTUR	158
159	Kadi.	Sahwa		159
160	Hen.			160
161				161
162				162
163				163
164				164
165				165
166				166
167				167
168				168
169				169
170				170
171				171
172				172
173				173
174				174
175				175
176				176
177				177
178				178
179				179
180				180
181				181
182				182
183				183
184				184
185				185

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
187				187
188				188
189				189
190				190
191				191
192				192
193				193
194				194
195				195
196				196
197				197
198				198
199				199
200				200

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Drs. DRUPODO, M.Si
NIP. 19670421 199303 1 009

PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DALAM RANGKA HUT KE-74
PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
DI DEPAN SIDANG BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat Pagi,
Salam Damai Sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan

Yang saya hormati, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia; Yang saya hormati, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
Yang saya hormati, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara;
Yang saya hormati Bapak BJ Habibie, Presiden Republik Indonesia Ketiga; Yang saya hormati Ibu Hajah Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia Kelima; Yang saya hormati Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia Keenam;
Yang saya hormati Bapak Try Sutrisno dan Bapak Hamzah Haz; Yang saya hormati Bapak Boediono beserta Ibu Herawati Boediono; Yang saya hormati Ibu Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid;
Yang saya hormati Bapak Kyai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Terpilih masa bakti 2019-2024; Yang saya hormati sahabat saya Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Sandiaga Uno;
Yang saya hormati, Para Duta Besar Negara-Negara Sahabat dan para Pimpinan Perwakilan Badan dan Organisasi Internasional;

Yang saya hormati para hadirin serta Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak kita semua untuk meneguhkan semangat para pendiri bangsa kita, bahwa Indonesia itu bukan hanya Jakarta, bukan hanya Pulau Jawa.
Tetapi, Indonesia adalah seluruh pelosok tanah air, dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote.

Pembangunan yang kita lakukan harus terus Indonesia sentris.
Karena itulah pembangunan yang kita lakukan harus terus Indonesia sentris yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok Nusantara.
Indonesia Maju bukan hanya karya Presiden dan Wakil Presiden bukan hanya karya lembaga eksekutif lembaga legislatif ataupun yudikatif saja. Tetapi keberhasilan Indonesia juga karya pemimpin agama, budayawan dan para pendidik.
Keberhasilan Indonesia adalah juga karya pelaku usaha, buruh, pedagang, inovator maupun petani, nelayan dan UMKM, serta karya seluruh anak bangsa Indonesia.
Kecepatan kita dalam meraih cita-cita adalah peran besama. Peran PDIP Golkar dan Nasdem, PKB dan PPP Perindo, PSI dan Hanura, PBB dan PKPI. Dan jangan lupa juga peran Gerindra, PKS dan Demokrat serta PAN, Partai Berkarya dan Partai Garuda.
Saya yakin jika kita sepakat dengan satu visi Indonesia Maju kita mampu melakukan lompatan kemajuan, lompatan untuk mendahului kemajuan bangsa lain.
Sebagai Kepala Negara yang merangkap Kepala Pemerintahan. Sebagai Presiden dalam sistem Presidensial yang dimandatkan konstitusi, saya mengajak kita semua untuk optimis dan kerja keras.

Sayalah yang memimpin lompatan kemajuan kita bersama.

Saudara-saudara Se-Bangsa dan Se-Tanah Air,
Saat ini kita berada dalam dunia baru dunia yang jauh berbeda dibanding era sebelumnya. Globalisasi terus mengalami pendalaman yang semakin dipermudah oleh revolusi industri jilid ke-4.
Persaingan semakin tajam dan perang dagang semakin memanas. Antar-negara berebut investasi, antar-negara berebut teknologi, berebut pasar, dan berebut orang-orang pintar.
Antar-negara memperebutkan talenta-talenta hebat yang bisa membawa kemajuan bagi negaranya.
Dunia tidak semata sedang berubah tetapi sedang terdisrupsi. Di era disrupsi ini kemapanan bisa runtuh ketidakmungkinan bisa terjadi.
Jenis pekerjaan bisa berubah setiap saat, banyak jenis pekerjaan lama yang hilang. Tetapi juga makin banyak jenis pekerjaan baru yang bermunculan. Ada profesi yang hilang, tetapi juga ada profesi baru yang bermunculan.
Ada pola bisnis lama yang tiba-tiba usang dan muncul pola bisnis baru yang gemilang dan mengagumkan. Ada keterampilan mapan yang tiba-tiba tidak relevan dan ada keterampilan baru yang meledak yang dibutuhkan.
Arus komunikasi dan interaksi yang semakin mudah dan terbuka harus dimanfaatkan dan sekaligus diwaspadai. Pengetahuan dan pengalaman yang positif jauh lebih mudah sekarang ini kita peroleh.
Tetapi kemudahan arus komunikasi dan interaksi juga membawa ancaman: ancaman terhadap ideologi kita Pancasila, ancaman terhadap adab sopan santun kita, ancaman terhadap tradisi dan seni budaya kita, serta ancaman terhadap warisan kearifan-kearifan lokal bangsa kita.

Indonesia tidak takut terhadap keterbukaan. Kita hadapi keterbukaan dengan kewaspadaan.
Dalam bidang pertahanan-keamanan kita juga harus tanggap dan siap. Menghadapi perang siber. Menghadapi intoleransi, radikalisme, dan terorisme, serta menghadapi ancaman kejahatan-kejahatan lainnya baik dari dalam maupun luar negeri yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa kita.
Indonesia tidak takut terhadap keterbukaan. Kita hadapi keterbukaan dengan kewaspadaan.
Kewaspadaan terhadap ideologi lain yang mengancam ideologi bangsa. Kewaspadaan terhadap adab dan budaya lain yang tidak sesuai dengan kearifan bangsa kita. Kewaspadaan terhadap apapun yang mengancam kedaulatan kita.
Indonesia tidak takut terhadap persaingan. Kita hadapi persaingan dengan kreativitas, inovasi, dan kecepatan yang kita miliki.
Karena itu tidak ada pilihan lain, kita harus berubah. Cara-cara lama yang tidak kompetitif tidak bisa diteruskan. Strategi baru harus diciptakan. Cara-cara baru harus dilakukan.
Kita tidak cukup hanya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi kita harus lebih baik dari yang lainnya. Sekali lagi, kita tidak cukup hanya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi kita harus lebih baik dari yang lainnya.
Dalam kompetisi global yang ketat berebut pengaruh berebut pasar berebut investasi. Kita harus lebih cepat dan lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Kita harus lebih cepat dan lebih baik dibanding negara-negara tetangga.
Investasi harus membuka lapangan kerja baru harus menguntungkan bangsa kita. Langkah demi langkah tidak lagi cukup, lompatan demi lompatan yang kita butuhkan. Lambat asal selamat tidak lagi relevan, yang kita butuhkan adalah cepat dan selamat.
Dalam situasi dunia yang penuh persaingan misi untuk ikut membangun tatanan dunia yang lebih baik tidak boleh diabaikan. Kontribusi pada perdamaian dunia harus kita lanjutkan.
Kontribusi pada kesejahteraan dunia harus kita tingkatkan. Inisiatif kolaborasi dan kerjasama pembangunan dunia harus kita kembangkan. Kemanusiaan harus tetap menjadi ruh politik luar negeri Indonesia.

Dunia yang kita huni bersama tidak selamanya mulus dan stabil. Tidak semuanya selalu pasti dan tidak selalu terduga sebelumnya.
Kita sedang menghadapi dinamika ekonomi global yang terus bergejolak dan menghadapi perubahan geopolitik. Krisis ekonomi melanda beberapa belahan dunia, krisis iklim mengancam dunia kerusakan lingkungan menjadi ancaman kita bersama.

Sikap sigap dan waspada menghadapi ketidakpastian sangatlah penting!
Ring of fire yang melingkari wilayah Indonesia bisa menghadirkan bencana tanpa kita duga
sebelumnya.
Hampir seluruh wilayah Indonesia merupakan wilayah rentan bencana. Gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, tsunami, kebakaran hutan, banjir.
Oleh karena itu sikap sigap dan waspada menghadapi ketidakpastian sangatlah penting!
Kapasitas kita dalam mengelola risiko menghadapi gejolak ekonomi global mengelola bencana yang tidak terduga harus kita perkuat.
Pembangunan kita harus sensitif terhadap berbagai risiko. Infrastruktur harus disiapkan mendukung mitigasi risiko bencana. Masyarakat juga harus waspada dan sadar risiko.

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya banggakan,
Kita butuh ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat kita bisa melompat dan mendahului bangsa lain.
Kita butuh terobosan-terobosan jalan pintas yang cerdik yang mudah yang cepat. Kita butuh SDM unggul yang berhati Indonesia, berideologi Pancasila.

Kita butuh inovasi-inovasi yang disruptif yang membalik ketidakmungkinan menjadi peluang.
Kita butuh SDM unggul yang toleran, yang berakhlak mulia. Kita butuh SDM unggul yang terus belajar bekerja keras, berdedikasi.
Kita butuh inovasi-inovasi yang disruptif yang membalik ketidakmungkinan menjadi peluang.
Yang membuat kelemahan menjadi kekuatan dan keunggulan. Yang membuat keterbatasan menjadi keberlimpahan. Yang mengubah kesulitan menjadi kemampuan. Yang mengubah tidak berharga menjadi bernilai untuk rakyat dan bangsa.
Berbekal inovasi, kualitas SDM, dan penguasaan teknologi kita bisa keluar dari kutukan sumber daya alam.
Memang negara kita ini kaya bauksit, batubara, kelapa sawit, ikan, dan masih banyak lagi. Tapi tidak cukup di situ. Kalau kita melakukan hilirisasi industri kita pasti bisa melompat lagi.
Kita bangun industri pengolahan bauksit sehingga impor alumina tidak perlu dilakukan.
Kita bangun hilirisasi industri batubara menjadi (Dimethyl Ether) DME sehingga kita bisa mengurangi impor jutaan ton LPG setiap tahunnya.
Kita bangun hilirisasi industri nikel menjadi ferro nikel sehingga nilai tambah nikel kita akan meningkat 4 kali lipat.
Kita harus berani memulai dari sekarang beberapa lompatan kemajuan sudah kita lakukan.
Kita sudah mulai dengan program B20, akan masuk ke B30 campuran solar dengan 30 persen biodiesel. Tapi kita bisa lebih dari itu kita bisa membuat B100.
Kita sudah memproduksi sendiri avtur hingga tidak impor avtur lagi. Tapi kita bisa lebih dari itu, kita bisa ekspor avtur, kita juga ingin produksi avtur berbahan sawit.
Kita sudah mulai membuka ruang pengembangan mobil listrik tapi kita ingin lebih dari itu, kita ingin membangun industri mobil listrik sendiri.

Kita harus berani melakukan ekspansi tidak hanya bermain di pasar dalam negeri.
Kita harus berani melakukan ekspansi tidak hanya bermain di pasar dalam negeri. Produk-produk kita harus mampu membanjiri pasar regional dan global, itu yang harus kita wujudkan.
Pengusaha-pengusaha dan BUMN-BUMN kita harus berani menjadi pemain kelas dunia. Itu yang harus kita lakukan.

Talenta-talenta kita harus memiliki reputasi yang diperhitungkan di dunia internasional. Itu yang harus kita siapkan. Sekali lagi kita harus semakin ekspansif, from local to global.
Jika kita, kita semua, segera serius berbenah bersama, saya yakin kita akan mampu melakukan lompatan-lompatan kemajuan secara signifikan.
Momentumnya adalah sekarang tatkala kita antara 2020 hingga 2024, berada di puncak periode bonus demografi.
Jika kita lebih fokus mengembangkan kualitas SDM dan menggunakan cara-cara baru maka
saya yakin bonus demografi menjadi bonus lompatan kemajuan.
Lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan harus kita dukung untuk melakukan pembenahan secara besar-besaran agar mampu menghadapi perubahan.

Keluarga dan lembaga pendidikan menempati peran sentral dalam pendidikan anak-anak kita.
Persaingan dunia yang semakin ketat dan disrupsi di berbagai bidang, membutuhkan kualitas SDM yang tepat.
Kita butuh SDM yang berbudi pekerti luhur dan berkarakter kuat. Kita butuh SDM yang menguasai keterampilan dan menguasai ilmu pengetahuan masa kini dan masa depan.
Pendidikan harus berakar pada budaya bangsa memperjuangkan kepentingan nasional dan tanggap terhadap perubahan dunia.
Keluarga dan lembaga pendidikan menempati peran sentral dalam pendidikan anak-anak kita. Budi pekerti sopan santun toleransi dan kedisiplinan termasuk kebiasaan mengantre dengan sabar dan teratur harus kita tanamkan sejak dini.
Biasa mandiri, percaya diri gotong royong, dan saling peduli harus kuat ditanamkan dalam pendidikan dasar kita.
Mencari sumber belajar sendiri, berpikir kritis, dan tidak mudah terhasut, problem solving, harus sudah tertanam kuat pada pendidikan menengah kita.
Keterampilan vokasional yang akan dibutuhkan pasar—the emerging skills—harus sudah dilatihkan sejak pendidikan menengah ini.
Untuk tingkat pendidikan tinggi kita harus berani mencanangkan target tinggi bahwa SDM lulusan pendidikan tinggi kita harus kompetitif di tingkat regional dan global.
Pertama, SDM kita harus kompetitif dalam karakter yaitu pekerja keras jujur kolaboratif solutif dan enterpreneurship.
Kedua, SDM kita harus kompetitif dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang menguasai the emerging skills yang mampu mengisi the emerging jobs dan inovatif dan membangun the emerging business.
Namun, untuk mencetak SDM yang pintar dan berbudi pekerti luhur harus didahului oleh SDM sehat dan kuat.
Kita turunkan angka stunting sehingga anak-anak kita bisa tumbuh menjadi generasi yang premium.
Kita perluas akses kesehatan dengan pemanfaatan teknologi dan pembangunan infrastruktur dasar ke seluruh pelosok tanah air.
Kita tingkatkan kualitas kesehatan dengan pengembangan inovasi dan budaya hidup sehat.

Hadirin yang Berbahagia,
Saya sangat menyadari bahwa strategi tersebut membutuhkan ekosistem politik, ekosistem hukum, ekosistem sosial yang kondusif.
Kita butuh untuk terus melakukan deregulasi penyederhanaan dan konsistensi regulasi.
Kita harus terus melakukan debirokratisasi penyederhanaan kerja, penyederhanaan proses yang berorientasi pada pelayanan.

Reformasi perundang-undangan harus kita lakukan secara besar-besaran.
Kita harus terus mencegah korupsi tanpa mengganggu keberanian berinovasi. Kita harus memanfaatkan teknologi yang membuat yang sulit menjadi mudah dan yang rumit menjadi sederhana.

Reformasi perundang-undangan harus kita lakukan secara besar-besaran. Saya mengajak kita semua pemerintah DPR, DPD, dan MPR, juga Pemda dan DPRD untuk melakukan langkah-langkah baru.
Kita tidak boleh terjebak pada regulasi yang kaku yang formalitas yang ruwet, yang rumit, yang basa-basi, yang justru menyibukkan, yang meruwetkan masyarakat dan pelaku usaha. Ini harus kita hentikan.
Kita tidak bisa membiarkan regulasi yang menjebak kita, menakut-nakuti kita, yang justru
menghambat inovasi. Ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya.
Regulasi yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman harus dihapus. Regulasi yang tidak konsisten dan tumpang tindih antara satu dan lainnya harus diselaraskan, disederhanakan, dan dipangkas.
Namun demikian, kita juga harus tanggap terhadap tantangan baru yang belum diatur dalam
peraturan perundang-undangan.
Pemanfaatan teknologi yang merusak keadaban bangsa, yang membahayakan persatuan dan kesatuan, yang membahayakan demokrasi, harus kita atur secara terukur.
Kita harus siaga menghadapi ancaman kejahatan siber termasuk kejahatan penyalahgunaan data.
Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita, kini data lebih berharga dari minyak.
Karena itu kedaulatan data harus diwujudkan hak warga negara atas data pribadi harus dilindungi. Regulasinya harus segera disiapkan tidak boleh ada kompromi!!
Sekali lagi, inti dari regulasi adalah melindungi kepentingan rakyat, serta melindungi kepentingan bangsa dan negara.

Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita, kini data lebih berharga dari minyak.
Regulasi harus mempermudah rakyat mencapai cita-citanya. Regulasi harus memberikan rasa aman. Dan regulasi harus memudahkan semua orang untuk berbuat baik, mendorong semua pihak untuk berinovasi menuju Indonesia Maju.
Oleh karena itu ukuran kinerja para pembuat peraturan perundang-undangan harus diubah. Bukan diukur dari seberapa banyak UU, PP, Permen atau pun Perda yang dibuat, tetapi sejauh mana kepentingan rakyat, kepentingan negara dan bangsa bisa dilindungi.
Saya ingatkan kepada jajaran eksekutif agar lebih efisien. Untuk apa studi banding jauh-jauh
sampai ke luar negeri padahal informasi yang kita butuhkan bisa diperoleh dari smartphone kita.
Ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM juga harus diubah termasuk kinerja pemberantasan korupsi.
Penegakan hukum yang keras harus didukung. Penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi.
Tetapi keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang dipenjarakan.
Harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM bisa dicegah, berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan. Ini perlu kita garis bawahi.
Oleh sebab itu manajemen tata kelola serta sistemlah yang harus dibangun. Sekali lagi manajemen tata kelola serta sistemlah yang harus dibangun.
Demikian pula ukuran kinerja aparat pengawasan dan birokrasi pelaksana.

Realisasi anggaran bukan diukur dari seberapa banyak anggaran yang telah dibelanjakan.
Tata kelola pemerintahan yang baik bukan diukur dari prosedur yang panjang dan prosedur ketat. Tetapi tata kelola pemerintahan yang baik tercermin dari prosedur yang cepat dan sederhana, yang membuka ruang terobosanterobosan, dan mendorong lompatan-lompatan.

Orientasi kerja pemerintahan, orientasi kerja birokrasi pelaksana, orientasi kerja birokrasi pengawas, haruslah orientasi pada hasil. Sekali lagi harus berorientasi pada hasil.
Realisasi anggaran bukan diukur dari seberapa banyak anggaran yang telah dibelanjakan tetapi diukur dari seberapa baik pelayanan kepada masyarakat, seberapa banyak kemudahan diberikan kepada masyarakat.
Kemudian ukuran akuntabilitas pemerintahan jangan dilihat dari seberapa banyak formulir yang diisi dan dilaporkan tetapi seberapa baik produk yang telah dihasilkan. Anggaran negara harus sepenuhnya didedikasikan untuk rakyat.
Pemanfaatan teknologi terbaru telah membuka peluang untuk mempermudah hal-hal yang dulu sulit, untuk mempermurah hal-hal yang dulu mahal, dan mempercepat hal-hal yang dulu lamban dan lama.
Penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan teknologi baru dalam bekerja harus pula disertai dengan penyederhanaan organisasi. Organisasi yang tumpang tindih fungsinya harus digabung.
Pekerjaan administrasi yang bisa dilakukan oleh komputer, dan oleh kecerdasan buatan (artificial intelligence), harus mulai dilepas.
Oleh karena itu jumlah organisasi dan jumlah aparat yang tidak efisien dan tidak relevan harus mulai dipangkas.
Dan tentu saja peningkatan kualitas dan kultur aparat mulai dari aparat negara, birokrat, TNI dan Polri dan pejabat BUMN, juga harus segera berubah. Harus segera berubah!
Kita tidak kompromi aparat yang mengingkari Pancasila. Kita tidak kompromi aparat yang tidak melayani yang tidak turun ke bawah.
Sebaliknya, kita cari kita apresiasi aparat yang selalu menebarkan optimisme, yang melakukan smart shortcut dan yang sepenuh hati melayani rakyat.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air yang saya banggakan,
Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridha Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan.

Saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan.
Ibukota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa.
Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia Maju.
Indonesia yang hidup selama-lamanya.
Dirgahayu Republik Indonesia!
Dirgahayu Negeri Pancasila!
SDM Unggul, Indonesia Maju!
Merdeka!
Terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya.

Jakarta, 16 Agustus 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
JOKO WIDODO

PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENGANTAR/ KETERANGAN ATAS RUU APBN TAHUN 2020
BESERTA NOTA KEUANGAN DAN DOKUMEN PENDUKUNGNYA

Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh,
Selamat Siang,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swasti Astu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah,
Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Lembaga Negara,
Yang saya hormati para Menteri Kabinet Kerja, Kepala Lembaga Pemerintahan, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung.
Hadirin sekalian yang berbahagia, serta Saudarasaudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Kita patut bersyukur bahwa di tengah gejolak perekonomian global, pembangunan ekonomi kita selama lima tahun ini telah menunjukkan capaian yang menggembirakan.
Pertumbuhan ekonomi kita trennya meningkat dari 4,88 persen di tahun 2015, menjadi 5,17 persen di tahun 2018, dan terakhir Semester I-2019 mencapai 5,06 persen. Angka pengangguran menurun dari 5,81 persen pada Februari 2015, menjadi 5,01 persen pada Februari 2019.
Penduduk miskin terus menurun dari 11,22 persen pada Maret 2015, menjadi 9,41 persen pada Maret 2019, terendah dalam sejarah NKRI. Ketimpangan pendapatan terus menurun, ditunjukkan dengan semakin rendahnya, Rasio Gini dari 0,408 pada Maret 2015, menjadi 0,382 pada Maret 2019.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 69,55 di 2015, menjadi 71,39 di 2018, atau masuk dalam status tinggi. Selain itu, tidak ada lagi provinsi dengan tingkat IPM yang rendah. Logistic Performance Index (LPI) naik dari peringkat 53 dunia pada 2014, menjadi peringkat 46 dunia pada 2018.

Dalam Global Competitiveness Index, kualitas infrastruktur kita termasuk listrik dan air meningkat, dari peringkat 81 dunia pada 2015, ke peringkat 71 dunia pada 2018.
Berbagai capaian tersebut tidak terlepas dari reformasi fiskal yang telah kita lakukan.
Kita tidak lagi menggunakan pola money follows function, tetapi money follows program.
Kita tidak lagi berorientasi pada proses dan output, tetapi pada impact dan outcome.
Kita terus mengelola fiskal agar lebih sehat, lebih adil, dan menopang kemandirian.
Namun, kita tidak boleh lengah. Tantangan ekonomi ke depan semakin berat dan semakin kompleks, ekonomi dunia sedang mengalami ketidakpastian, beberapa emerging market sedang mengalami krisis, dan beberapa negara sedang mengalami pertumbuhan negatif. Kita juga menghadapi tantangan perang dagang.
Depresiasi nilai mata uang beberapa negara seperti Yuan-Tiongkok dan PesoArgentina, membuat kita harus waspada.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya muliakan. Saat negara-negara lain ekonominya melambat, ekonomi kita harus mampu tumbuh. Situasi krisis harus kita balik sebagai peluang, kita harus jeli.
Kita manfaatkan kesulitan sebagai kekuatan untuk bangkit, untuk tumbuh, untuk Indonesia Maju. Salah satu kuncinya adalah dengan terus meningkatkan daya saing nasional, dengan bertumpu pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

SDM yang berkualitas merupakan modal penting memasuki era ekonomi berbasis digital. Berbagai program pembangunan SDM kita siapkan, untuk memastikan bonus demografi menjadi bonus lompatan kemajuan.
Kita bangun generasi bertalenta yang berkarakter dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Indonesia memiliki modal awal untuk bersaing di tingkat global.
Jumlah penduduk kita nomor empat terbesar di dunia. Sebagian besar penduduk kita berusia muda. Kelas menengah kita tumbuh dengan pesat.
Saya yakin dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM, Indonesia dapat segera mewujudkan visinya menjadi negara maju. Dengan tekad tersebut, tema kebijakan fiskal tahun 2020 adalah "APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia".

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya muliakan,
Pada tahun 2020, Pemerintah menyusun asumsi ekonomi makro sebagai berikut: Pertama, pertumbuhan ekonomi akan berada pada tingkat 5,3 persen dengan konsumsi dan investasi sebagai motor penggerak utamanya.
Inflasi akan tetap dijaga rendah pada tingkat 3,1 persen untuk mendukung daya beli masyarakat. Kedua, di tengah kondisi eksternal yang masih dibayangi oleh ketidakpastian, nilai tukar Rupiah diperkirakan berada di kisaran Rp14.400 per dolar Amerika Serikat.

Pemerintah yakin investasi terus mengalir ke dalam negeri, karena persepsi positif atas Indonesia dan perbaikan iklim investasi. Dengan demikian, suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan berada di tingkat 5,4 persen.
Ketiga, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan sekitar 65 dolar Amerika Serikat per barel. Dengan sensitivitas yang tinggi terhadap berbagai dinamika global, Pemerintah terus memantau pergerakan harga minyak dan komoditi global.
Keempat, melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, termasuk minyak dan gas bumi. Target lifting minyak dan gas bumi di tahun 2020 diasumsikan masing-masing sebesar 734 ribu barel dan 1,19 juta barel setara minyak per hari.
Seluruh gambaran perkiraan indikator ekonomi makro di atas menjadi dasar dalam penyusunan RAPBN tahun 2020.

Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota DPR RI dan DPD RI, pada tahun 2020, Pemerintah akan menempuh tiga strategi kebijakan fiskal, yaitu memobilisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi, meningkatkan kualitas belanja agar lebih efektif dalam mendukung program prioritas, serta mencari sumber pembiayaan secara hati-hati dan efisien melalui penguatan peran kuasi fiskal.
Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan RAPBN tahun 2020 dirancang ekspansif, namun tetap terarah dan terukur. Ini sebagai wujud dari komitmen Pemerintah, untuk membuat APBN lebih fokus dalam mendukung kegiatan prioritas, dengan tetap menjaga agar risikonya berada dalam batas aman.
Sesuai dengan tema kebijakan fiskal tahun 2020, fokus RAPBN diarahkan pada lima hal utama, yaitu Pertama, penguatan kualitas SDM untuk mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil, dan sejahtera.
Kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Ketiga, penguatan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi dan antisipasi aging population.
Keempat, penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk mendorong kemandirian daerah. Kelima, antisipasi ketidakpastian global.
Dengan fokus pada lima hal tersebut, dan berpatok pada karakter kebijakan fiskal yang ekspansif namun terarah dan terukur, maka defisit anggaran tahun 2020 direncanakan sebesar 1,76 persen dari PDB, atau sebesar Rp307,2 triliun dengan Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp2.221,5 triliun, serta Belanja Negara sebesar Rp2.528,8 triliun.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,
Dalam RAPBN tahun 2020, Belanja Negara direncanakan akan mencapai Rp2.528,8 triliun, atau sekitar 14,5 persen dari PDB. Belanja Negara tersebut akan digunakan untuk memperbaiki kualitas SDM dan melanjutkan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi.

Selain itu, belanja juga ditujukan untuk meningkatkan investasi dan ekspor, melalui peningkatan daya saing dan produktivitas, akselerasi infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung transformasi ekonomi, serta penguatan kualitas desentralisasi fiskal.
Sesuai dengan amanat konstitusi, Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari belanja negara.
Pada tahun 2020, anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp505,8 triliun, atau meningkat 29,6 persen, dibandingkan realisasi anggaran pendidikan di tahun 2015 yang sekitar Rp390,3 triliun.
Dengan anggaran pendidikan yang meningkat tersebut, diharapkan tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal. Kemampuan dasar anak-anak Indonesia harus terus dibangun, mulai dari pendidikan usia dini dan pendidikan dasar.
Terutama untuk meningkatkan kemampuan literasi, matematika, dan sains, sehingga menjadi pijakan bagi peningkatan pengetahuan dan keterampilan anak di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Di jenjang pendidikan menengah dan tinggi, Pemerintah merancang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri. Pemerintah juga mencetak calon-calon pemikir, penemu, dan entrepreneur hebat di masa depan.
Kebijakan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia juga akan ditekankan pada perbaikan kualitas guru, mulai dari proses penyaringan, pendidikan keguruan, pengembangan pembelajaran, dan metode pengajaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi.
Pada pendidikan dasar dan menengah, dalam rangka pemerataan akses pendidikan dan percepatan wajib belajar 12 tahun, Pemerintah melanjutkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 54,6 juta siswa pada tahun 2020.
Selain itu, Pemerintah juga melanjutkan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan memberikan beasiswa hingga 20,1 juta siswa.
Setelah pemenuhan wajib belajar 12 tahun, Pemerintah juga merasa perlu untuk memberikan akses yang lebih luas kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi.
Hanya lewat pendidikan yang lebih baik kita dapat memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.
Oleh sebab itu, Pemerintah pada tahun 2020 memperluas sasaran beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi kepada 818 ribu mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, yang memiliki prestasi akademik melalui Kartu Indonesia PintarKuliah (KIP-Kuliah), termasuk lanjutan bidik misi.
Beasiswa KIP-Kuliah ini juga diberikan untuk mahasiswa pendidikan vokasi dan politeknik, serta pendidikan sarjana pada program studi sains dan teknologi.
Untuk meningkatkan akses keterampilan bagi anakanak muda, para pencari kerja, dan mereka yang mau berganti pekerjaan, Pemerintah pada tahun 2020 akan menginisiasi program kartu Pra-Kerja. Di mana mereka dapat memilih jenis kursus yang diinginkan, antara lain coding, data analytics, desain grafis, akuntansi, bahasa asing, barista, agrobisnis, hingga operator alat berat.

Hadirin yang saya muliakan,
Sesuai dengan amanat UU Kesehatan tahun 2009, sejak tahun 2016 Pemerintah konsisten menjaga anggaran kesehatan, setidaknya 5 persen dari belanja negara.
Berbagai program kesehatan yang dilakukan Pemerintah selama ini, telah mampu meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, seperti ketersediaan dan penyebaran obat serta tenaga kesehatan di daerah, maupun akses rumah tangga terhadap sanitasi dan air bersih.

Untuk memperkuat layanan kesehatan pada tahun 2020, Pemerintah mengalokasikan Rp132,2 triliun untuk anggaran kesehatan, atau naik hampir dua kali lipat dari realisasi anggaran kesehatan di tahun 2015 sebesar Rp69,3 triliun.
Pada tahun 2020, kita terus melanjutkan program prioritas di bidang kesehatan, dengan memperkuat layanan dan akses kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, diikuti ketersediaan tenaga kesehatan yang berkualitas. Penguatan program promotif dan preventif juga dilakukan, melalui pemenuhan gizi dan imunisasi balita, serta edukasi publik tentang pentingnya pola hidup sehat untuk menekan angka penyakit tidak menular. Konvergensi program dan kegiatan percepatan penurunan stunting pada tahun 2020 juga diperluas mencakup 260 kabupaten/kota. Program dukungan bagi kesehatan dan keselamatan ibu hamil dan melahirkan juga menjadi prioritas. BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional dibenahi secara total.

Hadirin yang saya hormati,
Pemerintah juga terus memberikan perlindungan, khususnya bagi 40 persen lapisan masyarakat terbawah, sejak dari dalam kandungan hingga lanjut usia. Agar perlindungan sosial itu efektif dan efisien, Pemerintah terus memperbaiki target sasaran, meningkatkan sinergi antar-program, dan melakukan evaluasi agar kebijakan berbasis bukti.
Pada tahun 2020, Pemerintah akan menyalurkan anggaran pada 96,8 juta jiwa penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), melanjutkan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga penerima manfaat, dan menyalurkan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kepada 15,6 juta keluarga melalui kartu sembako.
Dengan kartu sembako, keluarga penerima manfaat dapat membeli dan memilih bahan pangan yang lebih beragam, karena jumlah bantuan yang diterima meningkat menjadi Rp1,80 juta per keluarga per tahun, dari sebelumnya sebesar Rp1,32 juta per keluarga per tahun.
Selain dari bantuan yang ditujukan pada keluarga tak mampu, Pemerintah juga hadir untuk melanjutkan program-program yang mendukung usaha ultra mikro dan UMKM.

Semua ini didesain untuk memastikan unit sosial dan ekonomi terkecil di masyarakat, baik keluarga maupun UMKM yang memang membutuhkan uluran tangan, dapat tersentuh langsung oleh program Pemerintah.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,
Belanja negara pada tahun 2020 juga difokuskan untuk pengurangan ketimpangan antarwilayah. Oleh karena itu, kita akan melanjutkan pengembangan berbagai kawasan ekonomi di luar Jawa, melanjutkan industrialisasi dalam bentuk hilirisasi hasil tambang maupun perkebunan, dan mengembangkan beberapa wilayah metropolitan di luar Jawa, supaya bisa menjadi sumber ekonomi baru.
Selama ini, denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa.
Apabila kita membiarkan hal ini berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah.
Untuk itu, rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks ini, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa. Ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru dan terbarukan, tidak bergantung kepada energi fosil. Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN. Kita dorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema Kerja sam Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Hadirin sekalian,
Selain meningkatkan pembangunan SDM, Pemerintah melanjutkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, terutama di daerah tertinggal,m terdepan,

dan terluar (3T). Untuk infrastruktur di luar kawasan 3T, Pemerintah menekankan perbaikan manajemen, tata kelola, dan kerangka regulasi, agar makin mendukung transformasi ekonomi.Infrastruktur terus dibangun ke seluruh pelosok dan difokuskan pada konektivitas di sepanjang rantai pasok, menghubungkan pasar dengan sentra-sentra produksi rakyat, mulai dari pertanian, perikanan, perkebunan, dan industri, termasuk UMKM. Kita juga akan meneruskan pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) dan transportasi massal lainnya, agar keseluruhan sistem transportasi di kota-kota besar semakin efisien, semakin bersih dari polusi, dan terkoneksi secara menyeluruh.

Dukungan pembangunan infrastruktur juga dilakukan melalui skema pembiayaan kreatif, seperti Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Partisipasi swasta dalam penyediaan infrastruktur publik melalui skema pembiayaan kreatif semacam ini, dilakukan dengan memperhatikan value for money.

Di sektor pariwisata, pada tahun 2020 Pemerintah memprioritaskan pembangunan empat destinasi wisata secara lintas sektor dan terintegrasi. Destinasi pariwisata tersebut meliputi Danau Toba, Candi Borobudur, Labuan Bajo, dan Mandalika.
Subsidi energi untuk BBM, listrik, LPG 3 kg, serta subsidi pupuk, terus diperbaiki agar tepat sasaran dan efektif membantu rakyat yang kurang mampu, agar menjaga efisiensi dan daya saing ekonomi, serta meningkatkan produktivitas petani.
Belanja pegawai yang meningkat harus dikaitkan dengan reformasi birokrasi, baik di pusat maupun di daerah. Birokrasi yang tidak melayani dan menghambat investasi, serta tidak responsif terhadap kebutuhan rakyat, harus dipangkas. Anggaran belanja barang yang boros dan membebani APBN, harus dihapus.
Pemerintah tetap memperhatikan kesejahteraan aparatur negara, dengan mempertahankan kebijakan penggajian yang sudah ada melalui pemberian gaji dan pensiun ke-13 serta Tunjangan Hari Raya (THR).
Pemerintah juga menyiapkan reformasi skema program pensiun dan Jaminan Hari Tua (JHT) untuk aparatur negara.
Berbagai belanja tersebut diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada tahun 2020, yakni penurunan pengangguran ke tingkat 4,8 persen sampai 5,1 persen. Selain itu, kemiskinan diharapkan dapat terus diturunkan di kisaran 8,5 persen sampai 9,0 persen dan ketimpangan menurun di kisaran 0,375 sampai 0,380. Pemerintah juga optimis pembangunan kualitas manusia dapat terus ditingkatkan dengan target IPM mencapai 72,51 pada tahun 2020.

Hadirin yang saya muliakan,
Desentralisasi fiskal di Indonesia pada tahun 2020 telah mencapai dua dasawarsa. Sejak pertama kali dialokasikan, anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sudah meningkat sangat signifikan. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah dalam mempercepat pembangunan di daerah.
Pada tahun 2020, Pemerintah akan mengalokasikan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp858,8 triliun. Jumlah tersebut sudah meningkat 5,4% dari perkiraan realisasi di tahun 2019, atau meningkat 37,8 persen dari realisasinya di tahun 2015 yang sebesar Rp623,1 triliun.
Peningkatan alokasi tersebut akan diiringi dengan peningkatan kualitas implementasinya, agar belanja pemerintah daerah dapat meningkatkan layanan dasar publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta mengurangi kesenjangan dan kemiskinan.
Sejalan dengan itu, kapasitas Pemerintah Daerah untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah, dengan tetap menjaga iklim investasi dan usaha di daerah perlu ditingkatkan.
Dalam lima tahun terakhir, hasil dari dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sudah dirasakan oleh sebagian besar masyarakat melalui peningkatan kinerja pelayanan dasar publik, seperti akses rumah tangga terhadap sanitasi dan air minum layak, persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan, serta angka partisipasi murni (APM) dari PAUD sampai dengan SMA sederajat.

Tingkat kesenjangan di perdesaan juga menurun, yang ditunjukkan dengan semakin rendahnya Rasio Gini dari 0,334 pada tahun 2015, menjadi 0,317 pada tahun 2019.
Demikian juga dengan kesenjangan fiskal antardaerah, di mana Indeks Williamson turun dari 0,726 pada tahun 2015, menjadi 0,597 pada tahun 2018.
Selain itu, melalui DAK fisik, Pemerintah juga sudah berhasil membangun berbagai infrastruktur bagi masyarakat.
Selama periode 2017-2018, DAK fisik telah dimanfaatkan untuk peningkatan jalan sepanjang 17,7 ribu kilometer, penyelesaian pembangunan jembatan sepanjang 7,8 ribu meter, pembangunan ruang kelas baru sebanyak 14,2 ribu unit, pembangunan laboratorium sekolah sebanyak 4,0 ribu unit.
Peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi sebanyak 373,1 ribu hektare, pembangunan rumah dan peningkatan kualitas rumah sebanyak 112,3 ribu unit, serta rehabilitasi sarana prasarana kesehatan sebanyak 8,6 ribu unit per paket.
Pada tahun 2020, selain dukungan pendanaan kelurahan, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk penghasilan tetap perangkat desa, agar kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa meningkat.
Selain itu, telah dialokasikan juga anggaran untuk penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mendukung pembiayaan dari APBD.

Sementara itu, Dana Desa pada tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp72 triliun. Penggunaan dana desa tersebut akan lebih ditingkatkan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa, sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa.
Di samping itu, dana desa diharapkan dapat mendorong inovasi dan entrepreneur baru, sehingga produk-produk lokal yang dimiliki oleh setiap desa dapat dipasarkan secara nasional, bahkan global, melalui market place.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,
Untuk mencapai sasaran pembangunan di atas, diperlukan peningkatan pendapatan negara pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp2.221,5 triliun.
Mobilisasi pendapatan negara dilakukan, baik dalam bentuk optimalisasi penerimaan perpajakan, maupun reformasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Di bidang perpajakan, Pemerintah melanjutkan reformasi perpajakan berupa perbaikan administrasi, peningkatan kepatuhan, serta penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan.

Dalam rangka mendukung peningkatan daya saing dan investasi, Pemerintah memberikan insentif perpajakan melalui beberapa instrumen, yaitu: perluasan tax holiday, perubahan tax allowance, insentif investment allowance, insentif super deduction untuk pengembangan kegiatan vokasi dan litbang serta industri padat karya.
Untuk industri padat karya, memperoleh juga fasilitas pembebasan Bea Masuk dan subsidi pajak. Pemerintah juga akan menempuh kebijakan penyetaraan level playing field, bagi pelaku usaha konvensional maupun e-commerce, untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan di era digital.
Sementara itu, reformasi PNBP dilakukan melalui penguatan regulasi dan penyempurnaan tata kelola dengan tetap menjaga kualitas pelayanan publik.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,
Kebijakan fiskal tahun 2020 bersifat ekspansif, terarah, dan terukur. Defisit anggaran pada tahun 2020 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati sehingga berkelanjutan.
Utang dikelola melalui kombinasi instrumen yang efisien, di antaranya dengan mempertimbangkan faktor risiko, serta pemanfaatannya secara lebih produktif.
Utang dimanfaatkan antara lain untuk kegiatan yang mendukung program pembangunan nasional, baik di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, maupun pertahanan dan keamanan.

Pembiayaan yang kreatif untuk akselerasi pembangunan infrastruktur juga dilakukan dengan memberdayakan peran swasta, melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Pengelolaan fiskal yang hati-hati, selalu dijaga Pemerintah secara konsisten. Defisit anggaran dan rasio utang terhadap PDB tetap dikendalikan dalam batas aman, di bawah tingkat yang diatur dalam UU Keuangan Negara, sekaligus untuk mendorong keseimbangan primer menuju positif.
Upaya tersebut ditunjukkan dengan diturunkannya Defisit Anggaran dari 2,59 persen terhadap PDB pada tahun 2015, menjadi sekitar 1,93% pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 diturunkan lagi menjadi 1,76 persen.
Sejalan dengan itu, defisit keseimbangan primer juga dipersempit dari Rp142,5 triliun pada tahun 2015, menjadi sekitar Rp34,7 triliun pada tahun 2019, dan diupayakan lebih rendah lagi menjadi Rp12,0 triliun pada tahun 2020.
Kebijakan fiskal tersebut, diharapkan mampu menjaga keseimbangan primer atau bahkan surplus dalam waktu dekat. Selain itu, utang pemerintah terus dikelola secara transparan dan akuntabel, dengan memperkecil risiko pada stabilitas ekonomi di masa sekarang dan akan datang.

Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat,
Saya mengajak kita semua agar mulai hari ini, mulai saat ini, mulai detik ini, kita gerakkan seluruh sumber daya ekonomi Indonesia untuk mewujudkan lompatan-lompatan kemajuan.
Kita buktikan, bahwa Indonesia memang layak dan mampu menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Kita tunjukkan, bahwa ekonomi Indonesia dapat tumbuh sekaligus memberikan rasa keadilan.
Kita wujudkan ekonomi Indonesia yang menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Demikianlah Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, beserta Nota Keuangannya.
Pemerintah berharap, pembahasan RAPBN tahun 2020 dapat dilakukan secara konstruktif, demi terwujudnya Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya bagi kita semua dalam menjalankan amanah seluruh rakyat Indonesia.

Dirgahayu Republik Indonesia!
Dirgahayu Negeri Pancasila!
SDM Unggul Indonesia Maju!
Terima kasih,
Wassalammu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya
Salam Kebajikan.

Jakarta, 16 Agustus 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
JOKO WIDODO